

**KAJIAN PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
USAHA RAKYAT
DI PROPINSI JAWA BARAT**

Oleh:

Hj. Lely Savitri Dewi, SE., Msi.



IKOPIN

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

2018

**KAJIAN PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
USAHA RAKYAT
DI PROPINSI JAWA BARAT**

Oleh:
Hj. Lely Savitri Dewi, S.E., M.Si.

Didokumentasikan
Pada Perpustakaan Ikopin sebagai Bacaan Mahasiswa
Program S1 dan D3



(Ida Ahadiah, S.Sos.)
Kepala Perpustakaan Ikopin

IKOPIN
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
BANDUNG
2018

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankan kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan informasi dan fasilitas yang sangat besar dalam penyusunan makalah ini terutama kepada para pihak yang mewakili IKOPIN, Nara Sumber dari beberapa bank pelaksana penyalur Kredit Usaha Rakyat di kota Bandung serta perusahaan Penjaminan Kredit yang telah bersedia dalam memberikan informasi seputar Kredit Usaha Rakyat.

Kajian ini ditujukan terutama untuk mengangkat model-model implementasi penyaluran di berbagai bank dan proses penjaminannya dengan harapan dapat memberikan saran untuk pengembangan penyaluran KUR selanjutnya di tahun mendatang.

Saran dan kritik tentunya sangat kami hargai sebagai input yang berharga untuk penyempurnaan makalah ini. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, November 2018

Penulis

The logo of IKOPIN is a large, stylized watermark in the background. It features a central emblem with a tree-like structure inside a shield-like shape, flanked by two vertical bars. Below this emblem are several horizontal lines. The word "IKOPIN" is written in large, bold, capital letters at the bottom of the page.

IKOPIN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	1
I. Pendahuluan	2
II. Pembahasan	3
2.1. Model Aplikasi Pelaksanaan KUR di Berbagai Bank Pelaksana	3
2.1.1. Model Aplikasi Penyaluran KUR pada Bank Mandiri	3
2.1.2. Model Aplikasi Penyaluran pada Bank BNI	4
2.2. Tinjauan Bank Indonesia	5
2.3. Mekanisme Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	6
2.3.1. Implementasi Penjaminan KUR di PERUM JAMKRINDO	6
2.4. Model Pendampingan terhadap UMKM	7
2.5. Peran Lembaga Linkage dalam penyaluran KUR	7
III Penutup	9
Daftar Pustaka	

IKOPIN

KAJIAN PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MELALUI MODEL PERBANKAN

Oleh :
Lely Savitri Dewi, SE., M.Si.

ABSTRAK

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan bank terbesar yang mendapatkan alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah telah menyalurkan KUR senilai **Rp 44,4 triliun** kepada lebih dari 2,2 juta debitur hingga akhir Juni 2018. Direktur Utama BRI, Suprajarto menyebutkan bahwa pencapaian ini tercatat setara 55,9 persen dari target penyaluran KUR BRI di tahun 2018 yakni sebesar Rp 79,7 triliun. PT [Bank Mandiri](#) Tbk terus merealisasikan komitmen dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat ([KUR](#)). Pada periode Januari-Agustus 2018, perseroan telah menyalurkan KUR sebesar **Rp 11,83 triliun** kepada 179.249 debitur. Adapun target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun ini adalah Rp 17,56 triliun, naik dari Rp 14,56 triliun, menyusul penyesuaian plafon KUR oleh Kementerian Koordinator Perekonomian pada 24 Agustus 2018 lalu.

Sampai dengan September 2018, penyaluran KUR BNI telah mencapai **Rp 12,86 triliun** atau 95% dari target Rp 13,5 triliun. Disalurkan kepada 97.500 UMKM. Dengan demikian penikmat KUR jauh meningkat dibanding tahun lalu yg mencapai 62.000 UMKM.

Dari temuan dilapangan terdapat hal hal yang menjadi fokus kajian yakni :

1. Program linkage KUR dengan Koperasi,
Dalam hal ini disarankan suatu pola yang seragam dengan menggunakan Linkage Program antara LKM dengan Bank Pelaksana KUR dimana pola pembiayaan yang ditawarkan menggunakan konsep bagi hasil. Potensi Koperasi simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam penyaluran KUR sangat besar, karena selama ini menggunakan modal sendiri dalam penyaluran pinjaman pada anggotanya
2. Model Tanggung Renteng
Peranan dari kelompok peternak ini sangat besar karena dalam kelompok inilah calon debitur diseleksi secara seksama terutama unsur karakternya yakni penilaian terhadap kesediaan / kesanggupan calon debitur dalam membayar pengembalian angsuran pokok dan bunga secara tepat waktu, dan apabila menurut pandangan kelompok bahwa peternak calon debitur ini tidak layak, maka kelompok bisa menggantikannya oleh peternak lain yang dinilai layak. Dari sisi bank hal ini tentu saja sangat membantu dari sisi pengenalan calon debitur terutama untuk menganalisis sisi karakter debitur yang terbilang baru ini, karena sisi karakter sangat sulit dianalisis dan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pengembalian kredit yaitu berhubungan dengan sejauhmana kesadaran debitur untuk membayar hutang (*Willingness to pay*).

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, UMKM

I. PENDAHULUAN

Dilihat dari aspek penyaluran kredit pada UMKM dan Koperasi, program KUR telah berjalan cukup cepat, berdasarkan data terbaru penyaluran KUR periode September 2018 terdapat kenaikan sekitar 36 % dari sisi jumlah UMKM penerima KUR. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan program KUR menunjukkan dampak positif terkait dengan kinerja usaha UMKM dan Koperasi. Namun demikian perlu kiranya dilakukan kajian tindak yang kontinue dari berbagai model skim pembiayaan KUR dari setiap bank penyalur untuk menilai skim yang paling efektif diantara semuanya.

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai, dalam penyelenggaraan program KUR ditemukan beberapa indikasi menurut pengamatan di lapangan antara lain :

1. Penyaluran KUR apabila dilihat dari sisi Bank pelaksana pada kondisi akhir masih terdapat kelambatan dalam perkembangannya seperti pada Bank Pelaksana PT Bank BRI Tbk terdapat penurunan sebesar 55% dari target penyaluran tahun 2018, pada Bank BNI target tercapai penurunan sebesar 95% dari target tahun 2018, pada Bank MANDIRI 67 % dari target. Dari ke tiga Bank diatas terutama BRI merupakan Bank penyalur KUR tertinggi di Indonesia.
2. Belum meratanya penyaluran KUR secara Linkage Program terutama melalui Koperasi, di satu sisi mekanisme ini justru dapat mempercepat proses penyaluran KUR itu sendiri
3. Terbatasnya jumlah Bank pelaksana Program KUR yang selama ini baru dilaksanakan oleh 6 (enam) Bank yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, BTN. Dengan asumsi ditambahkan bank pelaksana tentunya target penyaluran akan lebih cepat tercapai
4. Masih adanya kendala dalam penerapan Sistem Informasi Debitur yang mengakibatkan Bank Pelaksana kesulitan mencari sasaran KUR yang feasible dan tidak Bankable artinya secara kelayakan dari sudut keuangan dapat dinyatakan layak, akan tetapi dari administrasi pencatatan, kelayakan jaminan dan sebagainya sasaran KUR ini masih belum dapat dinyatakan layak dari kaca mata perbankan .
5. Penetapan penilaian jaminanyang beragam pada masing masing Bank Pelaksana sehingga masih menyulitkan bagi calon nasabah dalam pengajuan kredit tersebut .
6. Ketidakjelasan informasi tentang KUR di media massa sehingga timbul opini publik bahwa KUR adalah kredit program pemerintah padahal pure kredit komersial dengan berdasarkan kelayakan bisnis murni untuk menekan risiko kredit

Dari indikasi-indikasi tersebut, maka perlu sekali dikaji dan diidentifikasi faktor-faktor dominan apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas penyaluran KUR tersebut sehingga dapat dijadikan contoh model yang dapat diterapkan secara luas. Berikut ini adalah paparan hasil dari kajian pelaksanaan KUR di Jawa Barat.

II. PEMBAHASAN

2.1. Model Aplikasi Pelaksanaan KUR di Berbagai Bank Pelaksana.

2.1.1. Model Aplikasi Penyaluran KUR pada Bank Mandiri

Porto folio Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan oleh Bank Mandiri berdasarkan data terakhir sebesar perseroan telah menyalurkan KUR sebesar **Rp 11,83 triliun** kepada 179.249 debitur di seluruh Indonesia. Dengan kondisi tingkat kelancaran pengembalian cukup baik karena Non Performing Loan (Kredit Bermasalah) yang dialami hanya sekitar kurang dari 1 %. Artinya 99 % pelaksanaan KUR pada Bank Mandiri dinyatakan Lancar. Jika melihat keberhasilan Bank Mandiri dalam penekanan risiko kredit ini dikarenakan terdapat beberapa strategi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Strategi Pemasaran KUR

Bank Mandiri melakukan seleksi sasaran dengan mencari sendiri debitur yang layak usahanya dengan pendekatan secara linkage program antara petani, kelompok tani dan pabrikan yang bekerjasama dengan usaha debitur, dengan pertimbangan bahwa jika terdapat jaminan bahwa hasil produk usaha debitur ini dapat terjamin pemasarannya kepada pabrikan maka secara capacity usaha anggota ini layak untuk dibiayai karena pasar pembelinya jelas. Sebagai contoh di wilayah Pangalengan, bank membiayai pembelian sapi perah untuk debitur peternak, dengan syarat tergabung dalam kelompok peternak dan adanya jaminan pembelian susu sapi oleh pabrikannya, berikut gambaran secara singkatnya :



Peranan dari kelompok peternak ini sangat besar karena dalam kelompok inilah calon debitur diseleksi secara seksama terutama unsur karakternya yakni penilaian terhadap kesediaan / kesanggupan calon debitur dalam membayar pengembalian angsuran pokok dan bunga secara tepat waktu, dan apabila menurut pandangan kelompok bahwa peternak calon debitur ini tidak layak, maka kelompok bisa menggantikannya oleh peternak lain yang dinilai layak. Dari sisi bank hal ini tentu saja sangat membantu dari sisi pengenalan calon debitur terutama untuk menganalisis sisi karakter debitur yang terbilang baru ini, karena sisi karakter sangat sulit dianalisis dan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pengembalian kredit yaitu berhubungan dengan sejauhmana kesadaran debitur untuk membayar hutang (Willingness to pay).

b. Model Penilaian Agunan

Pada dasarnya agunan dinilai secara kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Aspek Kualitatif ; jaminan harus memenuhi aspek aspek sebagai berikut :

Market Ability (Mudah Dipasarkan)

Ascertain Ability (Memiliki standar harga yang pasti)

Stability (Nilai jual kembali agunan harus stabil)

Transfer Ability (Mudah dipindahtangankan secara legal)

2. Aspek Kuantitatif terkait dengan sebaran risiko , masing bank berbeda standar dalam hal ini.

Secara umum Bank Mandiri melakukan penilaian agunan dari obyek usaha yang dibiayai. Dengan sebaran risiko sebagai berikut :

a) 70 % risiko usaha dijamin oleh PT ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia)

b) 30 % risiko usaha disebarkan dalam bentuk nilai obyek usaha 50% dan nilai agunan tambahan 50 %

Berdasarkan penilaian agunan di atas, jelas bahwa bank hanya menanggung risiko usaha (kredit) relatif kecil yaitu dari obyek usaha yang dibiayai, hal ini diantisipasi bank dengan memastikan obyek usaha debitur menghasilkan pendapatan usaha karena terjaminnya pembelian susu sapi peternak oleh pabrikan dalam hal ini PT Indomilk untuk kasus peternak Pangalengan di atas. Kiranya model ini dapat memberikan gambaran bagaimana agar bank dapat aman menyalurkan kreditnya pada masa penyaluram berikutnya. Sebagai informasi Bank Mandiri memfokuskan penyaluran KUR untuk para peternak sapi dengan menggunakan sistem tanggung renteng dalam kelompok peternak.

2.1.2. Model Aplikasi Penyaluran pada Bank BNI

Dalam pemasaran kredit usaha rakyat ini, terdapat beberapa strategi yang cukup menarik ditawarkan oleh BNI diantaranya :

a) Pendirian UKC (Unit Kredit Kecil) dengan merekrut tenaga outsourcing yang bertugas memasarkan kredit dengan target min dalam 1 bulan senilai Rp 750 juta atau 90 debitur, satu unit UKC terdiri dari 3 orang petugas dimana kepala unit UKC berwenang menyetujui plafond kredit sampai Rp 300 juta.

b) Sistem On-Line antar UKC sehingga mempercepat proses keputusan realisasi kredit, hal ini sangat berpengaruh karena dengan periode keputusan yang singkat dan terintegrasi dapat mendorong minat calon debitur potensial untuk merespon kredit yang ditawarkan.

c) Model Kampung Binaan Bni

Dengan sistem inti plasma. BNI berhasil menciptakan suatu model linkage program antara penduduk, bank dan pabrikan. Seperti contoh kasus di Subang, BNI membiayai peternak dengan menyediakan kredit untuk pembelian bibit sapi potong kepada peternak sebagai plasma, kemudian setelah periode tertentu plasma menjual ke Inti, dimana hasil penjualan sapi tersebut dilakukan bagi hasil dengan bank. Dari model tersebut, BNI berperan sebagai agent of development, karena berhasil memobilisasi penduduk untuk bekerja di kampungnya, salahsatunya dengan ditetapkannya upah harian untuk pemeliharaan kandang sebesar Rp 25.000 per hari untuk memotivasi penduduk setempat agar tidak lari ke ibukota untuk mencari nafkah. Disamping itu model kampung binaan BNI terdapat pula di Tasik Ciamis dan Garut dengan produk unggulan Jagung, dengan target pencapaian areal tanam 10.000 ha, perkembangannya cukup signifikan, dengan hasil terakhir terrealisasi areal tanam seluas 4.600 ha dengan kondisi awal areal tanam 1946 sesuai tahun pendirian BNI, adapun sumbangan yang diberikan BNI berupa pemasangan sumur bor untuk mempermudah penyiraman tanaman di wilayah setempat.

2.2. Tinjauan Bank Indonesia

Perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Propinsi Jawa Barat dengan tingkat Non performing Loan yang cenderung meningkat, maka sudah seharusnya Bank Indonesia memberikan himbauan agar proses penyaluran Kredit dilakukan secara hati-hati (Prudential approach). Kondisi NPL terkonsentrasi pada sektor Pertambangan 88,41 %, sedangkan volume penyaluran kredit terbesar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan restoran. Untukmenciptakan situasi yang kondusif, Bank Indonesia telah menurunkan tingkat Aktiva Tertimbang Menurut Risiko pada bank pelaksana KUR tentunya dengan harapan agar Bank pelaksana dapat lebih ekspansi dalam percepatan penyaluran KUR ini. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurang tersosialisasinya program KUR ini sesuai sasaran, karena yang berkembang di masyarakat menurut pengamatan Bank Indonesia adalah bahwa Kredit Usaha Rakyat dapat diakses tanpa adanya agunan/jaminan padahal kredit ini murni komersial karena menggunakan dana pihak ketiga masing-masing bank pelaksana tentunya menghadapi risiko usaha yang sangat tinggi, walaupun pemerintah telah membantu dengan adanya program penjaminan melalui PT ASKRINDO dan PERUM JAMKRINDO, dengan sebaran 70 % dijamin oleh kedua perusahaan tersebut dan sisanya 30 % dijamin oleh bank pelaksana masing-masing dengan syarat penyerahan jaminan / agunan tambahan dari debnitr KUR.

Menurut pandangan Bank Indonesia, penerapan Sistem Informasi Debitur sangat penting untuk menganalisis track record debitutr KUR itu sendiri. Adapun latar belakang diberlakukannya Sistem Informasi Debitur ini atau sering diistilahkan BI Checking dengan pemikiran bahwa masih banyaknya UMKM yang belum tersentuh oleh kredit perbankan

yaitu sekitar 83 % dari total UMKM. Dengan adanya SID diharapkan dapat terjaring kelompok sasaran ini karena penerima KUR disyaratkan tidak pernah mendapat fasilitas kredit apapun termasuk fasilitas kartu kredit ataupun pembiayaan leasing. Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan kredit usaha rakyat ini justru bank pelaksana merasa kesulitan mencari debitur baru ini karena hampir semua atau dapat dikatakan sebagian besar UMKM telah tersentuh oleh fasilitas ini. Jadi perlu dipertimbangkan kembali sejauhmana kriteria penerima KUR tersebut agar penyaluran KUR ini lebih tepat sasaran karena sulit sekali mencari debitur yang belum pernah mendapat fasilitas kredit konsumtif seperti kredit pemilikan rumah (KPR), Pemegang Kartu Kredit dan fasilitas Leasing, dengan demikian dapat dibatasi bahwa calon penerima KUR adalah debitur yang belum pernah menerima fasilitas kredit produktif saja.

Walupun demikian untuk mewaspadai kesalahan penggunaan dana dari tujuan (mismatch) misalnya dapat terjadi kemungkinan penerima KUR menggunakan dana kredit tersebut untuk membayar hutang dari kredit konsumtifnya maka perlu ada batasan dalam kelonggaran SID ini misalnya pada plafond KUR di bawah Rp 25 juta, agar risiko kredit dapat diminimalisir.

2.3. Mekanisme Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

2.3.1. Implementasi Penjaminan KUR di PERUM JAMKRINDO

Dalam penyelenggaraan penjaminan, PERUM JAMKRINDO melaksanakan penjaminan mengikuti prosedur bank artinya setelah bank merealisasi kredit, maka secara otomatis perjanjian asuransi kredit (PAK) dilakukan penutupan atau sering disebut dengan proses PAK Otomatis. Adapun kondisi terakhir menunjukkan total penjaminan yang telah dilakukan adalah sebesar RP 25 milyar, adapun perkembangan pengajuan klaim masih nol artinya belum ada bank yang mengajukan klaim, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NPL nya nol artinya penyaluran kUR dengan penjamin dari PERUM JAMKRINDO dinilai lancar.

Kendala yang dihadapi cenderung ke arah teknis yaitu masalah penagihan imbal jasa penjaminan yang tersendat dari pemerintah, dimana hanya dilakukan dua periode yaitu bulan Mei dan Oktober dalam setahun hal ini tentu mempersulit posisi penjamin yang berprinsip dasar operasionalnya no fee, no klaim. Di lain pihak berdasarkan Kep. Men No 14/D.I.M. EKON/04/2009 bahwasecara keseluruhan pembayaran jika terjadi tuntutan klaim dari bank Pemberi Kredit/Pembiayaan apabila persyaratan klaim telah dipenuhi untuk dibayar sedangkan Pihak perusahaan penjamin belum menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari pemerintah, maka perusahaan penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut. Dari permasalahan tersebut perlu dikaji ulang mengenai masa penagihan imbal jasa yang hanya dilakukan dua kali dalam setahun, agar tercipta situasi yang saling mendukung antara bank pelaksana, perusahaan penjamin dan pemerintah dalam program penyaluran KUR ini.

Masalah teknis kedua yaitu keterlambatan syarat administrasi yaitu bank pelaksana terlambat dalam pengembalian surat penjaminan yang sudah diendorsesment pada polis dan copy surat penjaminan.

2.4. Model Pendampingan terhadap UMKM

Salah satu upaya Dinas yang membidangi koperasi di kota Bandung untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran KUR di Jawa Barat khususnya di kota Bandung adalah melakukan konsolidasi yang continue kepada seluruh stake holder seperti Bank Indonesia, Bank Pelaksana dan penerima KUR.

Disamping itu diselenggarakannya Program Pendampingan oleh sarjana pendamping dari berbagai disiplin ilmu dengan sasaran pendampingan terhadap perkuatan Koperasi dan UMKM dalam pengajuan proposal permohonan kredit ke bank dan bimbingan administrasi. Periode pendampingan dimulai dari tahap pemasaran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas. Dalam penyelenggaraan program ini, beban honor tenaga pendamping ini ditanggung oleh Pemprop Jawa Barat dengan kisaran Rp 11 juta untuk periode sebelas bulan per orang tenaga pendamping. Tentunya seleksi tenaga pendamping ini sangat ketat, terbukti sarjana yang berhak mengajukan diri harus memiliki indeks prestasi minimal 3.00 karena dalam pendampingan ini dibutuhkan keterampilan dan kemampuan akademik yang tinggi. Kendala yang dihadapi adalah faktor jangkauan wilayah pengawasan, dimana jarak ideal pelayanan usaha mikro ini maksimum 10 km, sedangkan karena terbatasnya jumlah tenaga pendamping maka jangkauannya menjadi lebih luas dan menyulitkan koordinasi serta pengawasan, untuk itu perlu difikirkan adanya tambahan jumlah tenaga pendamping dengan gaji yang lebih sepadan.

2.5. Peran Lembaga Linkage dalam penyaluran KUR

Lembaga Linkage adalah badan usaha keuangan yang antara lain berbentuk Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah (BPR/BPRS) atau Kelompok Usaha atau Lembaga Keuangan Mikro yang menghubungkan.

Dalam hal ini sebagai pengguna Kur terdapat beberapa temuan di lapangan, salah satunya menurut pengelola Baitul Maal Tamwil Barraqh, bawa terdapat ketidakseragaman kebijakan antara Bank Syariah Mandiri Pusat dan Cabang, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengguna KUR. Dalam hal ini disarankan suatu pola yang seragam dengan menggunakan Linkage Program antara LKM dengan Bank Pelaksana KUR dimana pola pembiayaan yang ditawarkan menggunakan konsep bagi hasil. Potensi Koperasi simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam penyaluran KUR sangat besar, karena selama ini menggunakan modal sendiri dalam penyaluran pinjaman pada anggotanya.

Adapun bentuk linkage program yang dapat digunakan adalah Pola Chanelling yaitu suatu bentuk penyaluran kredit/ pembiayaan dengan penerusan Kredit/ pembiayaan dari Bank Pemberi Kredit kepada UMKMK melalui lembaga Linkage dimana kewajiban dari pengembalian Kredit/ Pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab UMKMK selaku penerima KUR.



IKOPIN

III. PENUTUP

Dari pemaparan tersebut di atas maka dapat disimpulkan dan diajukan beberapa saran dan masukan untuk meningkatkan percepatan penyaluran KUR di Jawa Barat khususnya kota Bandung :

1. Perlunya informasi yang lengkap tentang bermacam macam model sehingga peta penyaluran kredit merata
2. Memperluas ruang pelayanan untuk usaha mikro seperti adanya UKC BNI, Gerai BRI dan lain lain.
3. Mengkombinasikan KUR dengan pelaksanaan model Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dimana dalam penyaluran dananya pemerintah menempatkan dana pada bank penyalur sehingga bank dapat menurunkan biaya dana (*cost of fund*)
4. Diperlukan dukungan dari Lembaga Penjamin Kredit Daerah sehingga mekanisme penjaminan lebih optimal disamping lembaga penjamin yang sudah ada
5. Memperlunak syarat SID/ BI checking
6. Mengoptimalkan peran tenaga pendamping sehingga pengembalian kredit lebih lancar artinya NPL dapat diminimalisir



IKOPIN

DAFTAR PUSTAKA

- M. Rahmat Firdaus. 2000. **Teori dan Analisis Kredit**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thomas Suyatno, dkk. 2003. **Dasar-Dasar Perkreditan**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- O. P. Simorangkir. 2001. **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non bank**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Statistik Perbankan Indonesia 2018-10-29
KONTAN.CO.ID – JAKARTA
Liputan6.com - Jakarta



IKOPIN